



## DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, F. (2023). Dampak Implementasi Perubahan Dasar Pengenaan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan (Studi Kasus Pada Pt. Berkat Sejati). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 6(2), 255. <https://doi.org/10.51877/jiar.v6i2.289>
- Baharta, Z., Elim, I., & Wokas, H. R. . (2020). Evaluasi Perhitungan Dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Kppn) Kotamobagu. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 94. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.27867.2020>
- Direktorat Jendral Pajak. 2013. Pajak Penghasilan. Jakarta Selatan
- Herry Purwono. 2010. Dasar-Dasar Perajakan & Akuntansi Pajak. Jakarta. Erlangga
- Ratna, S. (2008). *ISSN 2303-1174 Debora Natalia Watung, Analisis Perhitungan dan ....* 1(36), 265–273.
- Saba, Y. (2022). Income Tax Rate Article 23 And How To Calculate It Based On Tax Lax Number 36 Year 2008 Concerning Income Tax. *Jurnal Pitis AKP*, 5(2), 103–106.
- Sabil, Lestinarsih, A. S., & Pujiwidodo, D. (2018). Pengaruh E-Spt Pajak Penghasilan Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 2(2), 122–135. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v2i2.67>
- Sulastyawati, D. (2014). Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1530>

## LAMPIRAN

### 1. PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 82 TAHUN 2021

SALINAN



WALI KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 82 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Tegal sehingga perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal.

Mengingat . . .

## 2. PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2021



SALINAN

WALI KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL  
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendukung terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat di bidang Pemberdayaan Masyarakat perlu diakomodir ke dalam perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka untuk menetapkan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu merubah Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas

### 3. UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2004  
TENTANG  
PERBENDAHARAAN NEGARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara;
  - b. bahwa pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - c. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara;
  - d. bahwa Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/*Indische Comptabiliteitswet* (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53), tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA.

## 4. Surat Diterima Magang



**PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Nila Nomor 11 Tegal 52111 - ☎ (0283) 356787

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 423.4/1335.....

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Dra. NANY LESTARI,M.M.

NIP : 196509121985032004

Jabatan : Kepala Dinas

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

Dengan ini menyatakan bahwa :

NO	NAMA	NPM	PRODI	SMT
1.	Mochammad Ilham Dwi Suryaning Fajar	4221500004	M. Perpajakan	VI
2.	Nila Salindri Setyaningsih	4221500003	M. Perpajakan	VI

Sehubungan dengan hal tersebut, diatas pada prinsipnya kami tidak keberatan mahasiswa tersebut melaksanakan kerja Praktek di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, dengan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Dinas Lingkungan Hidup.

Demikian surat ini disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Tegal

**Dra. NANY LESTARY,M.M.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650912 198503 2 004

## 5. Dokumentasi Kegiatan Magang



## 1. Contoh pemberlakuan Efektifitas pelaporan Pajak

No	Tgl/Periode Pengisian (dd/M/yy)	Peristiwa (NPWP/NIK)	NPWP (format/landas/baz)	Nama Peristiwa	NIK (baza)	Peristiwa (Qd)	Format/landas/baz	Peristiwa (sasa)	NIK	Kode Objek Pajak	Perdagangan (NPWP/NIK?)	Perdagangan (baza)	Perdagangan (baza)	Perdagangan (baza)	Perdagangan (baza)	Perdagangan (baza)	Perdagangan (baza)	Tarif (%)	Ph. Dukung DP	Mendapat Fasilitas? (NSRD/TP/Lamp)	MonorSIG	Monor Surat DP	Fasilitas Ph.Lamp	Tarif Ph.Berdasarkan Ph.Lamp
1	26/02/2019	NPWP	895035000000	MUCHAMMAD HIKMA DITRINA		21-0099	NPWP	702304000000			10000	10000	5	300				5	300	N				
2	26/02/2019	NPWP	739720400000	MENANU DEBIRISANTO		21-0099	NPWP	702304000000			10000	10000	5	300				5	300	N				
3	26/02/2019	NPWP	930697000000	CHIFA KAMUDHINU		21-0099	NPWP	702304000000			10000	10000	5	300				5	300	N				
4	26/02/2019	NPWP	909579000000	FAHRI BAHUDIN AHMAD		21-0099	NPWP	702304000000			10000	10000	5	300				5	300	N				
5	26/02/2019	NPWP	688100000000	TESNO SETIADI		21-0099	NPWP	702304000000			10000	10000	5	300				5	300	N				
6	26/02/2019	NPWP	739935000000	MAMANSYERMAN AHMAD SFI		21-0020	NPWP	702304000000			7500	7500	15	1120				15	1120	N				
7	26/02/2019	NPWP	578699700000	TUANGKILIR ADHANT SJB		21-0020	NPWP	702304000000			7500	7500	15	1120				15	1120	N				
8	26/02/2019	NPWP	779187300000	UDAHANA SH		21-0020	NPWP	702304000000			7500	7500	15	350				15	350	N				
9	26/02/2019	NPWP	850786000000	ARTIPOSTHIANUS S.P. NIS		21-0020	NPWP	702304000000			7500	7500	15	350				15	350	N				
10	26/02/2019	NPWP	578651300000	MUHAMMAD DUNHAN		21-0020	NPWP	702304000000			7500	7500	15	350				15	350	N				
11	26/02/2019	NPWP	739523000000	SAPINDO GEMING SPT		21-0020	NPWP	702304000000			7500	7500	15	350				15	350	N				
12	26/02/2019	NPWP	440058000000	AULIA THARA HANIFA		21-0020	NPWP	702304000000			7500	7500	15	350				15	350	N				
13	26/02/2019	NPWP	495855000000	SPTI SINDUSTIA		21-0020	NPWP	702304000000			7500	7500	15	350				15	350	N				
14	26/02/2019	NPWP	578651300000	MUHAMMAD DUNHAN		21-0020	NPWP	702304000000			30000	30000	5	1500				5	1500	N				
15	26/02/2019	NPWP	468933000000	YULI PRASEPTIA S.KAL. Mkes		21-0020	NPWP	702304000000			32500	32500	15	4650				15	4650	N				
16	26/02/2019	NPWP	299671000000	KANAL S.Kom		21-0020	NPWP	702304000000			47500	47500	5	2350				5	2350	N				
17	26/02/2019	NPWP	705338000000	MUCHAMMAD PARAGI		21-0020	NPWP	702304000000			29000	29000	5	1200				5	1200	N				
18	26/02/2019	NPWP	702304000000	SIAMET		21-0020	NPWP	702304000000			49000	49000	5	2300				5	2300	N				